



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 29 April 2026

Halaman: 2

TERAS

Keamanan Daycare

KASUS kekerasan anak yang terjadi di tempat penitipan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta menggoreskan luka mendalam bagi citra kota yang selama ini identik sebagai kota pendidikan. Terlepas 53 anak diduga menjadi korban kekerasan lembaga pengasuhan anak usia dini tersebut. Polresta Yogyakarta mengamankan 30 orang, dan telah menetapkan 13 tersangka, yang terdiri atas satu kepala yayasan, satu kepala sekolah, dan 11 orang pengasuh.

Fakta bahwa institusi yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak justru berubah menjadi tempat trauma. Ironisnya, lembaga ini beroperasi di tengah lingkungan masyarakat namun tetap mampu lolos dari radar pengawasan otoritas terkait karena ternyata belum mengantongi perizinan. Pemerintah daerah harus mengukui kecolongan, sehingga harus lebih proaktif melakukan audit berkala secara mendadak (sidak), bukan hanya menunggu laporan masuk. Setiap lembaga pengasuhan wajib memiliki izin operasional yang jelas, serta memastikan seluruh stafnya melewati uji kompetensi psikologis dan latar belakang kriminal guna menjamin aspek keamanan moral dan emosional.

Selain pengawasan formal, transparansi teknologi harus menjadi standar baru yang tidak bisa ditawar. Setiap daycare diwajibkan menyediakan akses CCTV real-time yang dapat dipantau oleh orang tua melalui ponsel pintar kapan saja. Keterbukaan ini akan menjadi instrumen kontrol sosial yang efektif sekaligus memberikan rasa tenang bagi orang tua yang terpaksa menipiskan bush hatinya demi tuntutan pekerjaan. Jika sebuah lembaga keberatan dengan transparansi digital ini, maka patut dipertanyakan niat dan kualitas layanannya.

Diperlukan sinergi kolektif dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang berbasis komunitas, di mana warga sekitar juga berani melapor jika melihat kejangalan. Pendidikan anak usia dini adalah fondasi masa depan bangsa. Jangan biarkan kelalaian sistemik terus melahirkan predator berkedok pengasuh merusak masa kecil anak-anak. Perlindungan anak adalah harga mati yang tidak bisa dikompromikan oleh alasan administratif apa pun. ***

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005